

Abstrak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang turut berkontribusi untuk membiayai belanja negara disamping penerimaan dari sektor perpajakan. Peningkatan PNBP dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga hal ini berpotensi besar untuk terus ditingkatkan. Salah satu PNBP yang turut berkontribusi yaitu berasal dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan pemeriksaan BPK mengenai Laporan Keuangan Polri selama 7 tahun terakhir telah konsisten memperoleh opini WTP mulai 2014 hingga 2020. Namun disampaikan juga bahwa opini WTP tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Laporan Keuangan Polri telah bebas dari kesalahan. BPK tetap menemukan beberapa kesalahan dari laporan keuangan tersebut salah satunya yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau perlakuan akuntansi pendapatan pada Kantor Kepolisian Resor Temanggung dengan menggunakan laporan keuangan TA 2020 sebagai data primer serta wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan. Secara umum, hasil peninjauan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dari sisi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan akuntansi pendapatan Kepolisian Resor Temanggung telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 serta PMK 225/PMK.05/2019.

Kata Kunci: PNBP, Penerimaan Negara, Akuntansi, Kepolisian, dst

Abstract

Non-Tax State Revenue (PNBP) is part of state revenue that contributes to financing state expenditures beside revenues from the taxation sector. The increase in PNBP from year to year shows positive growth so this has great potential to continue to be improved. One of the non-tax revenues that have contributed is from the Indonesian National Police. Based on the BPK's examination of the Police Financial Reports for the past 7 years, they have consistently obtained WTP opinions from 2014 to 2020. However, it was also conveyed that the WTP opinions did not rule out the possibility that the Police Financial Reports were free from errors. BPK still found several errors in the financial statements, one of which was non-compliance with laws and regulations. This study was conducted to review the accounting treatment of income at the Temanggung Resort Police Office by using the 2020 financial statements as primary data and interviews to obtain additional information. In general, the results of the review show that the accounting treatment in terms of classification, recognition, measurement, presentation and disclosure of income accounting for the Temanggung Resort Police is in accordance with PP 71 of 2010 and PMK 225/PMK.05/2019.

Keywords: PNBP, State Revenue, Accounting, Police, etc